

# **Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kota Mojokerto**

Oleh:

Aditya Dwi Purnantoro, Dyah Lituhayu

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudharto Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7476405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## *ABSTRACT*

*Subscription parking retribution are payments for parking fees that must be paid by the owner of a motorized vehicle registered at the SAMSAT Office in Mojokerto City for a period of 1 (one) year in which payment is made in conjunction with the tax payment of the vehicle concerned. The purpose of the subscription parking retribution policy is contained in the Mojokerto Mayor Regulation No. 7 of 2010 is to increase PAD from the regional retribution sector and to improve parking services to the public. However, in its implementation despite being able to increase PAD in Mojokerto City significantly the parking fee retribution policy has not been able to provide maximum parking services. The purpose of this study was to determine the process of implementing a subscription parking retribution policy and to find the factor of implementing a subscription parking retribution policy did not run optimally. This type of research is descriptive research using qualitative methods. The results showed that the input indicators, process indicators and supervisory indicators that were evaluated were factors for the implementation of the subscription parking retribution policy not running optimally. Among them are aspects of human resources, retribution collection methods, effectiveness and efficiency, supervisory resources, intensity of supervision, and aspects of the method of taking corrective actions. Recommendations that can be given are increasing the standard of recruitment of parking officers, giving freedom to the public to choose whether to use retribution or not, increasing the number of supervisory resources, increasing the intensity of supervision, and improving supervision methods by increasing coordination with parking officers in the field.*

***Keywords: Policy Evaluation, Retribution, Resources***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengingat pentingnya PAD dalam menunjang finansial daerah, maka pemerintah daerah terus melakukan peningkatan dalam memaksimalkan penyerapan PAD. Salah satu usaha pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pembahasan ini adalah melalui retribusi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Pada penelitian ini retribusi parkir berlangganan yang merupakan bagian dari retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk dalam retribusi jasa umum. Dasar Hukum dari kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kota Mojokerto adalah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Kota Mojokerto.

Kebijakan pemungutan retribusi parkir berlangganan memiliki tujuan untuk meningkatkan PAD dan memberikan pelayanan perparkiran. Dalam praktiknya, sejak berlakunya kebijakan retribusi parkir berlangganan mulai tahun 2011, PAD Kota Mojokerto mengalami kenaikan dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum. Tercatat 99% dari total penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Mojokerto adalah kontribusi dari retribusi parkir berlangganan dan sisanya sebesar 1% adalah dari penerimaan retribusi parkir konvensional. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 1.1**

Perbandingan Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan dan Konvensional Kota Mojokerto Tahun 2011-2016

Tahun	Berlangganan	Konvensional	Realisasi
1	2	3	4 = (2+3)
2011	2.466.423.350	31.541.500	2.497.964.850
2012	2.576.942.000	28.828.000	2.605.770.000
2013	2.903.342.500	28.235.000	2.931.577.500
2014	3.171.855.000	27.395.000	3.199.249.000
2015	3.445.106.000	34.630.000	3.479.736.000
2016	3.655.844.100	39.662.000	3.695.506.100

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto

Dibalik penerimaan retribusi yang tinggi, penerapan kebijakan parkir berlangganan di lapangan justru meresahkan masyarakat. Meskipun mampu mendongkrak PAD, pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan perparkiran dengan masih adanya juru parkir nakal yang memungut ongkos parkir kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan. Hal ini juga dibenarkan oleh pernyataan Abdullah Fanani Juru Bicara Pansus LKPJ Walikota Mojokerto dikutip dari [www.surabayapagi.co](http://www.surabayapagi.co):

“Tiada parkir tanpa ada pemungutan di Mojokerto. Ini adalah keluhan masyarakat yang sering kami terima terkait permasalahan parkir berlangganan” ([www.surabayapagi.com](http://www.surabayapagi.com), 18 April 2011).

Dari data di atas, terlihat bahwa penerapan kebijakan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kota Mojokerto belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemerintah Kota Mojokerto tidak mampu memberikan pelayanan kepada pengguna jasa layanan parkir berlangganan sehingga penerapan kebijakan pemungutan retribusi parkir berlangganan hanya berorientasi pada peningkatan PAD semata.

## B. Tujuan

1. Menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kota Mojokerto.
2. Menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi parkir berlangganan Kota Mojokerto.

## C. Teori

1. Administrasi Publik  
administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan administrasi publik menurut McCurdy (dalam Keban, 2008:3) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipal untuk melakukan berbagai fungsi negara. Lain halnya yang diungkapkan oleh Fesler (dalam Keban, 2008:5) administrasi publik adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik.
2. Kebijakan Publik  
Kebijakan publik menurut Charles O. Jones (dalam Wahab 2012:8) adalah "*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*". Berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya baik dipihak mereka yang mematuhi.

Definisi lainnya datang dari Eyestone, secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone dalam Wahab 2012: 13). Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat menyangkut banyak hal yang merumuskan secara pendek bahwa kebijakan publik adalah "*the relationship of governmental units to its environment*".

3. Evaluasi Kebijakan  
Menurut Anderson (dalam Winarno 2008: 226) mendefinisikan evaluasi kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun terhadap dampak kebijakan.
4. Indikator Pengukuran Evaluasi Kebijakan

Menurut Bridgman & Davis (dalam Badjuri, 2002: 138) pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indikator output, (4) indikator outcomes. Adapun penjelesannya adalah sebagai berikut:

- a. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
  - b. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
  - c. Indikator output (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan public. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
  - d. Indikator outcome (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.
5. Pengawasan
- Goerge R. Terry (dalam Manullang, 2015: 172) mengemukakan, “*Control is to determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to ensure result in keeping woth the plan*”. Selanjutnya Newman mengatakan “*Control is assurance that the performance conform to plan*”. Kemudian, Henry Fayol mengatakan, “*Control consist in verifying whether everything occure in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent reccurance. It operate in everything, peoples, actions.*”

Sedangkan T. Hani Handoko dalam bukunya (2003: 362) mengemukakan bahwa proses pengawasan sedikitnya terdiri atas lima tahapan. Tahap-tahapnya adalah 1) Penetapan standar pelaksanaan, 2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, 4) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard an penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan 5) pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

#### **D. Metode**

##### **1. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset lapangan dan menekankan objektivitas serta arti pengalaman bagi individu. Metode ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan pendapat/tanggapan masyarakat tentang bagaimana kebijakan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kota Mojokerto berjalan.

##### **2. Situs Penelitian**

Situs penelitian menempatkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokus atau wilayah/tempat yang diambil adalah Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

##### **3. Subjek Penelitian**

Penulis memilih informan mana yang akan dimintai keterangan untuk penelitian di lapangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
  - b. Juru parkir resmi di Kota Mojokerto
  - c. Masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan
4. Sumber Data  
Data diperoleh dari sumber:
- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi.
  - b. Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari majalah, surat kabar, dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan  
Data diperoleh dari arsip-arsip dinas, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian terdahulu, dan laporan-laporan dinas yang terkait dengan penelitian ini.
  - b. Wawancara  
Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Selain mengacu pada pedoman wawancara, peneliti juga mengembangkan pertanyaan secara spontan, sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal.
  - c. Observasi  
Observasi dalam hal ini adalah melakukan pengamatan secara langsung

berkaitan dengan lokasi penelitian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis dan Interpretasi Data  
Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kota Mojokerto

#### 1. Indikator Input

Indikator input yang dikaji dalam penelitian ini mencakup aspek sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dan juru parkir resmi sebanyak 144 orang. Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab atas sarana dan prasarana seperti tempat parkir yang memadai, stiker tanda parkir berlangganan, dan rambu sebagai penunjuk tempat khusus parkir berlangganan yang telah disediakan dengan baik.

#### 2. Indikator Proses

Indikator proses yang dikaji dalam penelitian ini antara lain proses pemungutan retribusi parkir berlangganan, efektivitas dan efisiensi, dan kerja sama. Dalam proses pemungutan retribusi parkir berlangganan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni retribusi parkir berlangganan dipungut bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan

bermotor. Hal ini dinilai efektif dalam meningkatkan PAD namun belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki hasil yang bagus karena mampu mengurangi kebocoran penerimaan dengan sistem parkir konvensional.

### 3. Indikator Pengawasan

Indikator pengawasan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi aspek sumber daya pengawas, intensitas pelaksanaan pengawasan dan metode pengambilan tindakan koreksi. Sumber daya pengawas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah juru parkir yang diawasi. Pelaksanaan pengawasan dinilai tidak efektif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi karena hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Sedangkan tindakan koreksi yang diambil Dinas Perhubungan masih bersifat represif dan terlalu bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan terkait penyimpangan yang terjadi.

## **B. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Kota Mojokerto**

1. Penyimpangan pada sumber daya manusia khususnya juru parkir berlangganan yang ditugaskan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan masih memungut ongkos parkir kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun, hal itu memiliki

kelemahan karena metode yang bersifat memaksa. Biaya retribusi parkir berlangganan dibebankan kepada seluruh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang tercatat di Kantor SAMSAT bersama Mojokerto. Hal ini merugikan bagi masyarakat yang kendaraannya sehari-sehari beraktivitas di luar wilayah Kota Mojokerto. Masyarakat tersebut tetap membayar retribusi tiap tahunnya namun tidak pernah mendapatkan manfaat dari retribusi parkir berlangganan.

3. Penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pada jumlah sumber daya pengawas yang tidak sebanding dengan juru parkir yang diawasi. Juru parkir resmi sebanyak 144 orang diawasi oleh 10 orang Dinas Perhubungan saja. Artinya setiap satu orang pengawas mengawasi setidaknya 15 orang juru parkir. Penyimpangan lainnya adalah pada intensitas pelaksanaan pengawasan yang hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu. Hal ini dinilai tidak efektif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perilaku nakal juru parkir. Metode pengambilan tindakan koreksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga dinilai masih bersifat represif dan terlalu bergantung pada laporan masyarakat terkait penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

## 1. Evaluasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan

- a. Indikator input dalam mengevaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan Kota Mojokerto dikaji dari aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kebijakan. Aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Kota Mojokerto dinilai masih kurang kompeten. Penyebabnya adalah karena sumber daya manusia khususnya juru parkir berlangganan tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana juru parkir yang bertugas seharusnya tidak memungut ongkos parkir kepada masyarakat yang sudah berlangganan parkir, namun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat pungutan ongkos parkir kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan. Aspek sarana dan prasarana penunjang kebijakan parkir berlangganan dinilai sudah cukup baik. Penyelenggara kebijakan telah mampu menyediakan sarana dan prasarana dengan baik dan memiliki kualitas yang baik pula berupa area tempat parkir yang luas dan memadai, rambu-rambu petunjuk area parkir berlangganan yang besar dan mudah dilihat, dan stiker sebagai tanda parkir sudah berlangganan parkir yang memiliki kualitas yang bagus.
- b. Indikator proses dalam mengevaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan Kota Mojokerto dikaji dari aspek proses pemungutan retribusi parkir berlangganan, aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan dan aspek kerja sama.

Dari aspek proses pemungutan retribusi parkir berlangganan, pada pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dengan menggunakan metode pemungutan yang diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Kota Mojokerto justru menimbulkan permasalahan lain yang belum mampu diselesaikan. Metode tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat Kota Mojokerto yang telah melunasi biaya retribusi parkir berlangganan tidak mendapatkan manfaatnya. Kemudian dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi parkir berlangganan yang belum dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan kebijakan berupa peningkatan pelayanan parkir kepada masyarakat dan cenderung hanya berorientasi pada peningkatan PAD. Hal ini dikarenakan metode pemungutan yang dinilai telah mewajibkan seluruh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang tercatat di SAMSAT Kota Mojokerto harus berlangganan parkir, sehingga penerimaan dari retribusi parkir berlangganan akan meningkat setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Mojokerto. Namun, dari penerimaan yang tinggi tersebut penyelenggara tidak mampu memberikan pelayanan parkir yang maksimal terbukti dengan adanya respon kurang memuaskan dari pengguna layanan parkir berlangganan terhadap pelayanan yang diberikan. Sedangkan dari aspek kerja sama yang dilakukan oleh penyelenggara dengan pihak

lain dinilai memiliki hasil yang positif. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dinilai mampu mengurangi kebocoran dana penerimaan retribusi parkir jika menggunakan sistem parkir konvensional.

- c. Indikator pengawasan yang diteliti meliputi aspek sumber daya pengawas, intensitas pelaksanaan pengawasan, dan aspek metode pengambilan tindakan koreksi. Aspek sumber daya pengawas dinilai masih sangat kurang dimana hanya terdapat 10 orang pengawas. Jumlah pengawas tersebut tidak sebanding dengan jumlah juru parkir berlangganan yang mencapai 144 orang. Aspek intensitas pelaksanaan pengawasan juga dinilai kurang karena hanya dilakukan pada hari Selasa untuk blok pertama dari area parkir berlangganan dan pada blok kedua area parkir berlangganan dilakukan pada hari Kamis. Artinya setiap tempat parkir berlangganan yang tersedia di seluruh Kota Mojokerto hanya dilakukan pengawasan satu kali dalam seminggu. Aspek metode tindakan koreksi dinilai kurang maksimal karena terlalu bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan berupa laporan mengenai adanya penyimpangan.

## 2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan

- a. Sumber daya manusia khususnya dari pihak juru parkir berlangganan belum mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Metode pemungutan retribusi parkir berlangganan yang bersifat memaksa dan mewajibkan seluruh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang tercatat di SAMSAT Kota Mojokerto untuk membayar biaya retribusi parkir berlangganan.
- c. Tidak adanya opsi berupa pilihan untuk mau berlangganan parkir atau tidak kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari area parkir berlangganan dan sebagian besar aktifitas kendaraannya dilakukan di luar wilayah Kota Mojokerto.
- d. Kurangnya jumlah sumber daya pengawas yang tersedia.
- e. Kurangnya intensitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pengawasan.
- f. Metode tindakan koreksi yang masih terlalu bergantung pada partisipasi masyarakat.

## B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan standar rekrutmen juru parkir berlangganan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, sehingga juru parkir resmi yang tersedia kompeten dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat.
2. Perlu adanya peningkatan insentif atau gaji yang diberikan kepada juru parkir berlangganan. Hal ini dinilai mampu mengurangi keinginan juru parkir untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan pungutan ongkos parkir kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan.
3. Pemerintah Kota Mojokerto seharusnya memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih apakah masyarakat mau menggunakan retribusi parkir berlangganan. Sehingga untuk masyarakat yang



bertempat tinggal jauh dari tempat parkir berlangganan dan masyarakat yang sebagian besar aktifitas kendaraannya dilakukan di luar wilayah Kota Mojokerto tidak perlu dibebankan biaya retribusi parkir berlangganan.

4. Peningkatan jumlah sumber daya pengawas dari Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.
5. Peningkatan intensitas pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dilakukan setiap minimal dua hari sekali atau tiga kali dalam satu minggu di setiap area parkir berlangganan.
6. Pembenahan metode pengawasan dengan melakukan peningkatan koordinasi antara pengawas dengan juru parkir berlangganan.
7. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan yang dapat dilakukan pada saat proses pemungutan retribusi parkir berlangganan agar masyarakat tidak memberikan ongkos parkir kepada juru parkir yang bertugas di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*. Semarang: Undip Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi 3*. Jogjakarta: Gavamedia.
- Manullang, M. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2007. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Medpress.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.
- Dokumen:
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Kota Mojokerto

Jurnal:

Febrianti, Yulia. 2013. *Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Brawijaya, Malang: Jurnal Administrasi Publik. Vol.1, No.6:1077-1085.

Lubis, Zulkifli. 2014. *Evaluasi Kinerja Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan*. Universitas Islam Lamongan, Lamongan: Jurnal Teknik. Vol.6, No.1:537-545

Richard N.R., Martinus. 2015. *Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan*. Universitas Airlangga, Surabaya: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. Vol.3, No.3:257-266.

Sopbaba, Semdi J.E. 2012. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Batu*. Universitas Tribuana Tungadewi, Malang: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.1, No.3:16-25.

Sumber berita:

*Dewan Endus Pungli Dishubkominfo*. (18 April 2011). Dalam [www.surabayapagi.com](http://www.surabayapagi.com) diunduh pada tanggal 13 Desember 2015

*Dishub Razia Pungli Parkir Berlangganan*. (10 Agustus 2011). Dalam [www.surabayapagi.com](http://www.surabayapagi.com) diunduh pada tanggal 13 Desember 2015

*DPRD Kritik Pelaksanaan Parkir di Mojokerto* (24 September 2010). Dalam [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co) diunduh pada tanggal 13 Desember 2015

*Pungli Parkir Berlangganan, Tak Diberi, Jukir Marah* (25 Oktober 2016). Dalam [radarmojokerto.jawapos.com](http://radarmojokerto.jawapos.com) diunduh pada tanggal 20 Maret 2017